

DAFTAR PUSTAKA

- B Mardjono Reksodiputro, 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya. Target Press.
- Harsono. 1993. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta. Djambatan.
- Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Moeljono, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Pidato Dies Natalis UGM
- Panjaitan, Petrus Irwan; Simorangkir, Pandapotan. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cetekan IX, Balai Pustaka..
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta

Jurnal dan Skripsi

Faisal, 2016. "Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana." Jurnal dari Erepo Unud, Universitas Udayana.

Rosa, Suhaenai. 2013. *Penemuan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Wahdaningsih, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013